



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJ. HUSNIWATI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 68428

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.419.000.000
1. Tanah Seluas 187 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/96 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/110 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
4. Tanah Seluas 758 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
5. Tanah Seluas 1200 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000		
6. Tanah Seluas 3172 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
7. Tanah Seluas 1440 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
8. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/105 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	337.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 GA/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 232.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	66.110.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	768.189.171



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.590.299.171
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.590.299.171

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.